

ISU PALESTINA DAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)

"Isu Palestina" telah menjadi agenda PBB sejak awal berdirinya organisasi. Isu tersebut telah menjadi bahan perdebatan, diskusi, dan negosiasi yang berkepanjangan. Terlepas dari semua upaya yang telah dilakukan, isu Palestina masih belum terselesaikan. Komunitas internasional harus terus memberikan daya upaya demi mencapai solusi yang komprehensif, adil, dan permanen, berdasarkan hukum internasional, resolusi-resolusi PBB yang relevan, serta prinsip-prinsip dasar untuk mengakhiri penjajahan, penghormatan terhadap hak-hak semua negara untuk hidup dalam damai dengan negara-negara tetangganya, dan pengakuan serta pemenuhan hak-hak yang melekat rakyat Palestina.

Majelis Umum PBB menetapkan bahwa hak-hak melekat tersebut meliputi: hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan pihak luar; hak atas kemerdekaan dan kedaulatan nasional; dan hak warga Palestina untuk memperoleh kembali rumah dan harta benda mereka [resolusi 3236 (XXIX) tanggal 22 November 1974].



UNITED NATIONS SPECIAL INFORMATION PROGRAMME ON
THE QUESTION OF PALESTINE

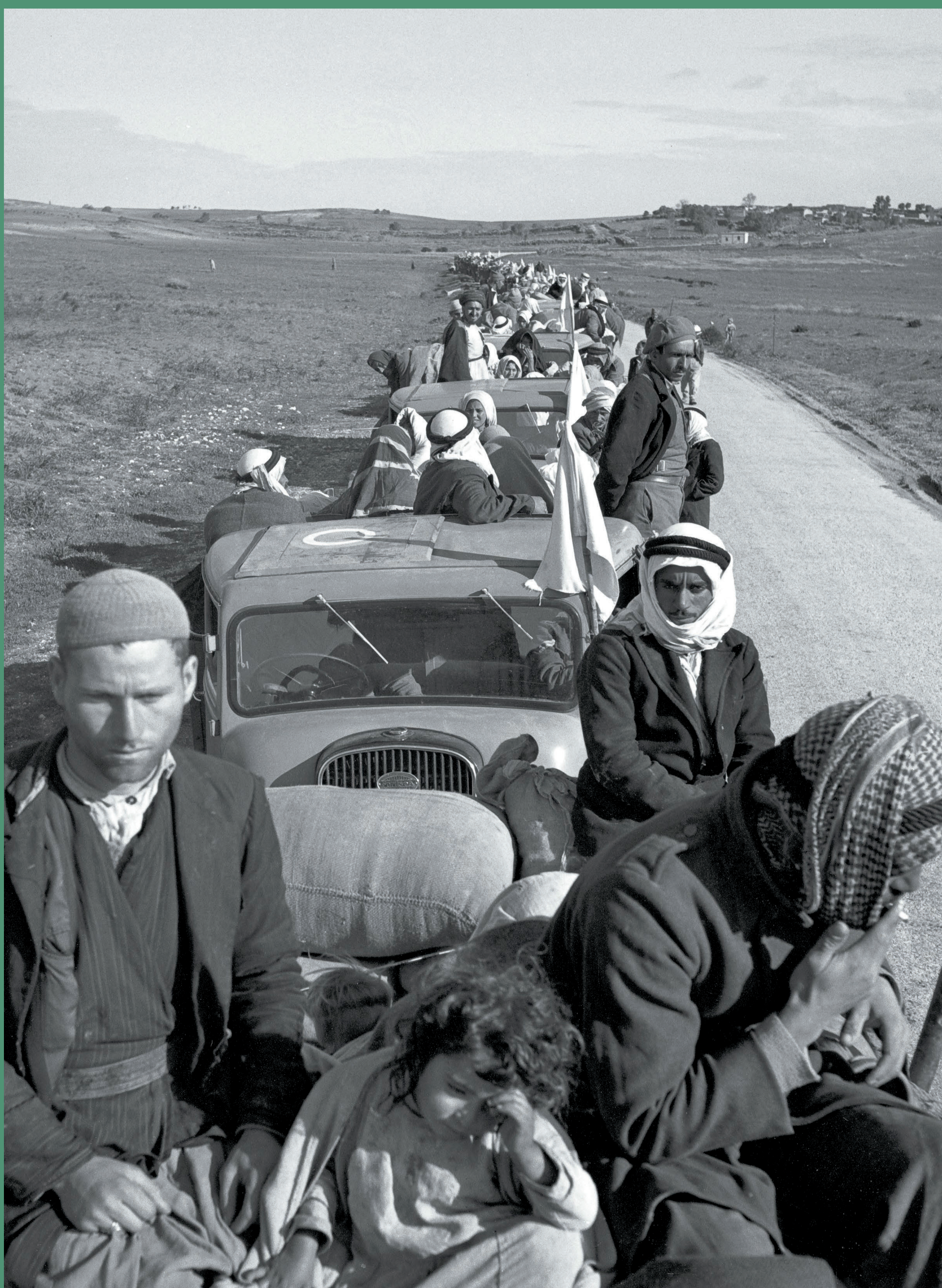
RENCANA PEMBAGIAN WILAYAH

Ketika PBB didirikan pada tahun 1945, Palestina dianggap sebagai tanah suci bagi umat Kristen, Yahudi, dan Muslim, yang pada saat itu dikelola oleh Inggris, di bawah mandat yang diterima pada tahun 1922 dari Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1947, ketika mandat Inggris atas Palestina akan segera berakhir, Majelis Umum PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina. Direncanakan dapat terbentuk Negara Arab dan Negara Yahudi yang merdeka dan sebuah rezim internasional khusus untuk Yerusalem. Rencana tersebut diterima oleh Badan Yahudi untuk Palestina, tetapi tidak oleh negara-negara Arab dengan alasan bahwa hal tersebut melanggar ketentuan Piagam PBB, yang mengakui penghormatan terhadap prinsip penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa. Pada tahun 1948, akibat perang antara Israel dan negara-negara Arab, hampir 750.000 orang Palestina terpaksa menjadi pengungsi.



Peta no. 4153 Perserikatan Bangsa-Bangsa Oktober 2000

**Negara Israel didirikan pada tahun 1948.
Negara Arab Palestina - tidak terbentuk.**



Dokumentasi PBB/LM:
Warga Palestina dari Al Faluja meninggalkan meninggalkan area konflik [Pada dan sekitar 26 Februari 1949]



Dokumentasi PBB:
Pengamat PBB dan bendera PBB telah dikenal anak-anak Palestina sejak akhir 1940. 1948 [Tanggal spesifik tidak diketahui]

PERANG, PENDUDUKAN, DAN PEMUKIMAN

Pada tahun 1967, setelah perang Arab-Israel, Israel menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serta Sinai di Mesir dan Golan di Suriah. Sedikitnya 500.000 warga Palestina terusir dari rumah mereka; sekitar setengahnya terusir untuk kedua kalinya sejak 1948.

Dewan Keamanan PBB menanggapi hal ini dengan mengadopsi resolusi 242, yang menyerukan penarikan pasukan bersenjata Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam konflik, penghentian semua klaim atau pernyataan berperang, dan penghormatan serta pengakuan terhadap kedaulatan, integritas wilayah, dan kemerdekaan politik setiap negara serta hak-hak mereka untuk hidup dalam damai di dalam batas-batas wilayah yang aman dan diakui.

Sejak tahun 1967, Pemerintah Israel berturut-turut telah membangun pemukiman di Wilayah Palestina yang Diduduki (Occupied Palestinian Territory / OPT). Total populasi pemukim di OPT, termasuk Yerusalem Timur diperkirakan mencapai lebih dari 570.000 jiwa, menurut laporan Kuartet Timur Tengah tahun 2016. Kegiatan pembangunan pemukiman Israel dianggap ilegal menurut hukum internasional. Pasal 49 Konvensi Geneva Keempat melarang kegiatan tersebut, yang menyatakan: "Pihak Pendudukan tidak boleh mendeportasi atau memindahkan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya."



Foto UNRWA oleh Shareef Sarhan. Anak-anak dalam perjalanan ke sekolah di Gaza, 2012

Saat ini, warga Palestina terus hidup di bawah rezim pendudukan. Mereka juga harus menghadapi kesulitan ekonomi serta pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional. Dalam beberapa kesempatan, kekerasan yang terus meningkat di antara warga Palestina dan Israel mendorong pecahnya konflik bersenjata terbuka yang memakan banyak korban sipil.



Hak Cipta: ActiveStills Collective
Terminal Betlehem selama bulan Ramadhan, Tepi Barat. 12 September 2008

Mahkamah Internasional (ICJ), badan yudisial utama PBB, memberikan Advisory Opinion (Pendapat Hukum) pada bulan Juli 2004, yang menegaskan bahwa "pembangunan tembok pemisah oleh Israel, sebagai negara penjajah, di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk di dalam dan di sekitar Yerusalem Timur, serta rejim yang menyertainya, bertentangan dengan hukum internasional."



Dokumentasi oleh Mussa Qawasma
Seorang wanita Palestina di pos pemeriksaan Israel di kamp pengungsi Al-Fawwar, Tepi Barat. 16 Agustus 2016



Hak Cipta: ActiveStills Collective
Para pengunjung rasa berbaris dalam sebuah demonstrasi menentang pemukiman dan pendudukan Israel di Nabi Saleh, Tepi Barat. 8 Januari 2010

BANTUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK RAKYAT PALESTINA

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East/UNRWA) didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan darurat kepada para pengungsi Palestina. Saat ini, UNRWA memberikan bantuan dan perlindungan kepada sekitar 5 juta pengungsi Palestina yang terdaftar, (dari lebih dari 11 juta orang Palestina di seluruh dunia) yang tinggal di Yordania, Lebanon, Suriah, Jalur Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Layanan yang diberikan UNRWA mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan layanan sosial, perbaikan dan peningkatan infrastruktur kamp pengungsi, keuangan mikro dan bantuan darurat.

Selain itu, badan-badan dan program khusus PBB lainnya, termasuk Bank Dunia, Badan PBB untuk kesejahteraan anak (United Nations Children's Fund/UNICEF), Program Pembangunan PBB, Dana Kependudukan PBB, dan Program Pangan Dunia (World Food Program/WFP) juga terus memberikan bantuan kepada rakyat Palestina di berbagai bidang, termasuk penyediaan makanan, pendidikan, pembangunan, dan pertanian.

Diperkirakan sekitar 1,6 juta orang Palestina, sekitar 33% dari populasi di Occupied Palestinian Territory (OPT), mengalami kerawanan pangan. Sebagian besar wilayah Palestina mengalami kekurangan air, dengan krisis yang paling parah terjadi di Gaza.



Foto WFP/Eyad al Baba
Konvoi kemanusiaan WFP menyeberang dari Mesir menuju Jalur Gaza. Perbatasan Gaza-Mesir, Rafah, 27 Agustus 2014



Foto UNRWA
Pada Januari 2014, ketika UNRWA berhasil menyelesaikan distribusi kemanusiaan pertamanya di kamp Yarmouk untuk para pengungsi Palestina setelah hampir enam bulan dikurung, UNRWA disambut oleh ribuan penduduk yang putus asa di jalan utama yang hancur.
Kamp Pengungsian Yarmouk, Damaskus, Suriah



Foto UNICEF oleh Loulou d'Aki
Para bidan memeriksa kesehatan bayi dan ibunya sebagai bagian dari program kunjungan rumah pascakelahiran yang dilakukan oleh UNICEF. Gaza, 2016



Foto oleh Austin Haeberle
Para peserta program pelatihan tahunan PBB untuk penyiar dan jurnalis Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, November 2014



UNRWA Foto oleh Shaza Ghadia
UNRWA bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial anak-anak pengungsi Palestina di Tepi Barat. Agustus, 2016

Pada tahun 1975, Majelis Umum PBB, melalui resolusi 3376, membentuk Komite tentang Pelaksanaan Hak-hak Melekat Rakyat Palestina (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People), yang ditugaskan untuk merekomendasikan program pelaksana yang memungkinkan rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan pihak luar, memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan nasional serta rumah dan harta benda mereka yang telah dirampas.

Pada tahun 1977, Majelis Umum PBB menyepakati tanggal 29 November sebagai peringatan tahunan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina. Pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi tentang pembagian wilayah Palestina.



Foto PBB/Kim Haughton
Majelis Umum PBB memperingati Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, 29 November 2017



Foto PBB/Anita Mathur
Biro Komite Pelaksanaan Hak-hak Melekat Rakyat Palestina dan Pengamat Permanen Negara Palestina untuk PBB bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB, Bapak António Guterres.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, 22 Maret 2017

MENCARI SOLUSI DUA NEGARA

Pada bulan April 2003, Uni Eropa, Amerika Serikat, Federasi Rusia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa - yang juga dikenal sebagai Kuartet - memperkenalkan sebuah prakarsa perdamaian, sebuah "Peta Jalan" menuju solusi permanen untuk dua negara (two-state solution). Rencana ini didukung oleh Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 1515 (2003). Peta Jalan tersebut menyerukan dicapainya kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan pendudukan, serta pembentukan dua Negara - Israel dan Palestina - yang saling mengakui dan hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan.

Setiap negara harus menjunjung tinggi komitmen untuk memastikan hak-hak sipil yang setara bagi seluruh warganya dan menghormati hak asasi dan martabat manusia. Melalui negosiasi, Yerusalem menjadi ibu kota masa depan dari dua negara. Harus pula dicapai solusi yang adil dan realistis mengenai masalah pengungsi.



Foto oleh Vince Musi/Gedung Putih
Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin berjabat tangan dengan mitranya dari Palestina, Yasser Arafat; dan Presiden AS Bill Clinton setelah penandatanganan Deklarasi Prinsip-prinsip yang juga dikenal sebagai "Perjanjian Oslo."
Gedung Putih, Washington, D.C., Amerika Serikat. 13 September 1993



Foto oleh Tim Media Sosial PBB/Isabella Pöschl
Bendera Negara Palestina dikibarkan untuk pertama kalinya di Markas Besar PBB di New York. 30 September 2015



Foto PBB/Marco Castro
Presiden Mahmoud Abbas menunjukkan salinan permohonan keanggotaan penuh PBB yang Ia ajukan beberapa saat sebelum pidatonya.
23 September 2011.

Meskipun ada komitmen yang jelas dari Israel, Palestina dan dunia internasional, Peta Jalan belum dapat diwujudkan.

Dengan tidak adanya kemajuan dalam mencapai Solusi Dua Negara, Majelis Umum PBB pada tanggal 29 November 2012 mengadopsi resolusi 67/19, yang memberikan status negara pengamat non-anggota (non-member observer state) kepada Palestina. Pada tanggal 30 September 2015, bendera Palestina dikibarkan untuk pertama kalinya di Markas Besar PBB di New York.

MEMBANGUN MASA DEPAN

Dengan meningkatnya pengakuan internasional kepada Negara Palestina, Palestina pada tingkat domestik berfokus pada pengembangan lembaga-lembaga sosial dan ekonomi, serta kerangka kerja politik dan legislatif yang bertujuan untuk memajukan negara Palestina. Komunitas internasional, termasuk badan-badan PBB, telah memberikan dukungan yang kuat terhadap upaya-upaya tersebut.



Hak Cipta Lulusan Jurnalistik 2011. Universitas-universitas di Palestina telah menjadi kontributor utama dalam menciptakan generasi baru yang profesional di berbagai bidang. Beberapa lulusan yang digambarkan dalam foto ini juga merupakan alumni Program Pelatihan PBB untuk Jurnalis Palestina. Universitas Birzeit. Ramallah, Tepi Barat. Juni 2011



Foto UNRWA/Shareef Sarhan. Penyanyi Gaza, Mohammed Assaf, pemenang Arab Idol tahun 2013 dan Duta Pemuda Regional UNRWA. Gaza, 2014



Foto UNRWA/Fadi Thabet. Anak-anak perempuan bermain sebagai bagian dari program kesehatan mental komunitas yang dikelola oleh UNRWA di sekolah-sekolah Gaza. 2015



Foto UNRWA/Alaa Ghosheh. Hanan Al-Hroub, seorang guru Palestina yang dianugerahi penghargaan bergengsi Global Teacher Prize. 2016



Foto PBB/Shareef Sarhan. Sekelompok siswa dari Pusat Pelatihan Khan Younis di Gaza, yang dikelola oleh UNRWA, merakit mobil bergaya Formula 1 yang sebagian besar komponennya merupakan barang daur ulang. Khan Younis, Gaza. 9 Juni 2011

TIMELINE

1974 Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 181, yang dikenal sebagai rencana pembagian wilayah Palestina. Resolusi ini menyerukan pembentukan Negara Arab dan Negara Yahudi di Palestina, dengan status internasional khusus untuk Yerusalem.

1948 Inggris melepaskan Mandatnya atas Palestina, dan pada tanggal 14 Mei, Negara Israel diproklamasikan. Permusuhan sengit terjadi antara komunitas Arab dan Yahudi. Keesokan harinya, pasukan reguler dari negara-negara Arab memasuki wilayah Palestina untuk membantu orang-orang Arab Palestina. Pertempuran dihentikan di bawah gencatan senjata yang diserukan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 29 Mei, yang akan diawasi oleh Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB (UNTSO).

1949 Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perjanjian gencatan senjata ditandatangani antara Israel dan negara-negara Arab, membentuk Garis Gencatan Senjata, yang juga dikenal sebagai Garis Hijau.

1967 dan **1973** Setelah dua perang, Dewan Keamanan PBB, dalam resolusi 242 (1967) dan 338 (1973), menjabarkan prinsip-prinsip perdamaian yang adil dan tahan lama, menekankan tidak dapat diterimanya penguasaan wilayah melalui perang, dan menyerukan negosiasi untuk mencapai tujuan tersebut.

1967 Pembangunan permukiman Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki (Occupied Palestinian Territory/OPT) dimulai sesaat setelah perang usai di tahun 1967, yang bertentangan dengan hukum internasional. Meskipun Dewan Keamanan PBB telah menyerukan kepada Israel untuk menghentikan kegiatan pembangunan pemukiman dan membongkar pemukiman, namun pemukiman terus dibangun di Wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, hingga hari ini.

1974 Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) diakui oleh Majelis Umum sebagai perwakilan rakyat Palestina dan diberikan status pengamat.

1975 Majelis Umum membentuk Komite tentang Pelaksanaan Hak-hak Melekat dari Rakyat Palestina, dan meminta Komite untuk merekomendasikan sebuah program aksi untuk memungkinkan rakyat Palestina melaksanakan hak-hak melekat, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.

1977 Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 32/40B, yang menyerukan peringatan tahunan tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina.

1987 Pemberontakan Palestina pertama (intifada pertama) melawan pendudukan Israel dimulai

1988 Dewan Nasional Palestina, gerakan Palestina "parlemen di pengasingan", memproklamasikan kemerdekaan Negara Palestina, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk resolusi Majelis Umum 181 (II).

1991 Konferensi Perdamaian Madrid diselenggarakan, mempertemukan kedua belah pihak untuk pertama kalinya, dan menciptakan jalur negosiasi bilateral bagi Israel dan negara-negara Arab tetangga serta Palestina. Kerangka acuan Konferensi, termasuk prinsip "tanah untuk perdamaian", terus menjadi tolok ukur untuk solusi negosiasi konflik.

1993 Menyusul pembicaraan rahasia di Oslo, Norwegia, antara Israel dan PLO, kedua belah pihak saling bertukar surat pengakuan. Dalam sebuah upacara di Gedung Putih di Washington, D.C., mereka menandatangani Deklarasi Prinsip-Prinsip Pengaturan Pemerintahan Sendiri Sementara, yang meluncurkan proses perdamaian antara kedua belah pihak. Intifada pertama mulai mereda.

1994 Ketua Organisasi Pembebasan Palestina Yasser Arafat kembali ke Wilayah Palestina yang Diduduki dan mendirikan Otoritas Nasional Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

1995 Perjanjian Sementara Israel-Palestina (Oslo-II) ditandatangani, membubarkan pemerintahan sipil Israel dan menetapkan berbagai tingkat tanggung jawab Israel dan Palestina atas wilayah-wilayah Tepi Barat. Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dibunuh di Tel Aviv oleh seorang ekstremis Israel pada tanggal 4 November.

1996 Dalam pemilihan umum pertama yang diselenggarakan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, Yasser Arafat terpilih sebagai Presiden Otoritas Palestina.

2000 Intifadhah (Al-Aqsha) kedua dimulai

2002 Prakarsa Perdamaian Arab diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab di Beirut. Uni Eropa, Amerika Serikat, Federasi Rusia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa - yang juga dikenal sebagai Kuartet - meluncurkan "Peta Jalan" yang mendorong terciptanya solusi permanen dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Israel memulai pembangunan tembok di sekitar dan di dalam Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

2003 Peta Jalan disahkan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi 1515 (2003) dan baik Israel maupun Otoritas Palestina berkomitmen untuk mengimplementasikan rencana tersebut.

2004 Mahkamah Internasional menyampaikan opini hukum pada 9 Juli bahwa pembangunan tembok di Wilayah Palestina yang Diduduki dan rezim yang terkait dengannya bertentangan dengan hukum internasional dan bahwa Israel berkewajiban untuk membongkar bangunan yang terletak di wilayah yang diduduki sejak tahun 1967. Yasser Arafat, yang kesehatannya terus menurun, meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Prancis pada tanggal 11 November.

2005 Intifada kedua mulai mereda. Israel mengerahkan pasukannya dari dalam Jalur Gaza.

2006 Majelis Umum mengadopsi resolusi ES-10/17 untuk menetapkan Daftar Kerusakan yang Disebabkan oleh Pembangunan Tembok di Wilayah Palestina yang Diduduki.

2008 Israel meluncurkan operasi militer, "Operation Cast Lead," di Jalur Gaza, dari 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009, sebagai tanggapan atas serangan roket. Diperkirakan 1.300 orang terbunuh dan 5.300 orang terluka di pihak Palestina, sementara 14 orang terbunuh dan 530 orang terluka di pihak Israel. Kehancuran yang meluas pada rumah dan properti bangunan Palestina.

2010 Presiden AS Barack Obama menegaskan kembali komitmennya untuk membantu para pihak mencapai solusi dua negara dalam pidatonya di Majelis Umum.

2011 Presiden Mahmoud Abbas mengajukan permohonan agar Palestina menjadi Negara Anggota PBB pada tanggal 23 September. UNESCO menerima Palestina sebagai Negara Anggota pada tanggal 31 Oktober.

2012 Majelis Umum mengadopsi resolusi 67/19, yang memberikan status negara pengamat non-anggota kepada Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 29 November.

2013 Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 68/12, yang menyatakan 2014 sebagai Tahun Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina.

2014 Putaran kekerasan lain meletus dan Israel meluncurkan "Operation Protective Edge" di Jalur Gaza, dari 8 Juli hingga 26 Agustus. Lebih dari 2.100 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 11.000 lainnya terluka. Di pihak Israel, 72 orang tewas dan sekitar 580 orang terluka.

2015 Palestina bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tanggal 1 April. Pada tanggal 30 September, bendera Palestina dikibarkan untuk pertama kalinya di Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah pidato yang disampaikan oleh Presiden Mahmoud Abbas di hadapan Majelis Umum PBB.

2016 Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 2334 pada tanggal 23 Desember yang menegaskan kembali bahwa permukiman Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran nyata di bawah hukum internasional, serta merupakan hambatan utama bagi Solusi Dua Negara. Resolusi tersebut juga mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk tindakan teror, serta semua tindakan provokasi, penghasutan, dan perusakan, dan menegaskan kembali visinya tentang sebuah wilayah di mana dua negara demokratis, Israel dan Palestina, hidup berdampingan secara damai dalam perbatasan yang aman dan diakui.

2017 Dalam pertemuan sesi khusus darurat pada 21 Desember, Majelis Umum mengadopsi resolusi "Status Yerusalem" (ES-10/19), yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang ditujukan untuk mengubah karakteristik, status, atau komposisi demografis Yerusalem adalah "batal demi hukum", menyerukan kepada semua negara untuk tidak mendirikan kedutaan besar di Kota Suci; dan menuntut agar negara-negara mematuhi semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan dan membalikkan "tren negatif" yang mengancam Solusi Dua Negara atas konflik Israel-Palestina.